

Free & Open Indo-Pasific Sebagai Grand Strategy as Dalam Peningkatan Perekonomian PNG

¹Venerini Gisela Wanguwesio, ²Triesanto Romulo Simanjuntak, ³Cristian H.J. de Fretes

¹²³Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia

Korespondensi : vnrgslla@gmail.com

Abstrak

Free and Open Indo-Pasific merupakan grand strategy Amerika Serikat, yang bertujuan agar antar masyarakat dan pemerintah memiliki visi yang selaras terkait Indo-Pasifik yang sama dalam perdamaian, stabilitas, serta wilayah yang bebas dan terbuka. Penulis melihat bahwa FOIP memberikan pengaruh terhadap peningkatan perekonomian pada tahun 2022 yang disebabkan oleh hubungan bilateral antar AS-PNG. Hubungan ekonomi bilateral yang terjalin antara AS-PNG tidak hanya membantu kestabilan perekonomian PNG tetapi juga menjadi investasi bagi masa depan AS dikarenakan posisi strategis dan potensi besar yang dimiliki oleh PNG. Maka dari itu, penulis menggunakan konsep kepentingan nasional dan liberalisme. Dengan Teknik pengambilan data sekunder dan metode penelitian kualitatif, tulisan ini akan membahas bagaimana Free and Open Indo Pasific sebagai grand strategy Amerika Serikat, dapat meningkatkan stabilitas perekonomian di Papua Nugini.

Kata kunci: *Free and Open Indo Pasific, Papua Nugini, Amerika Serikat, Kepentingan Nasional, Liberalisme*

Abstract

Free and Open Indo-Pacific as the grand strategy of the United States, intend to ensure that society and government have a common vision regarding the Indo-Pacific, which is the same in terms of peace, stabilities, and a free and open region. The author sees that FOIP have an impact on improving the economy in 2022, due to bilateral relations between the US and PNG. The bilateral economic relations that exist between the US and PNG not only help to stabilize PNG's economy, but are also an investment for the future of the US due to PNG's strategic position and great potential. Therefore, the author uses the concepts of national interests and liberalism. Using secondary data collection techniques and qualitative research methods, this article will discuss how Free and Open Indo Pacific, as the grand strategy of the United States, can increase economic stability in Papua New Guinea.

Keyword: *Free and Open Indo Pasific, Papua New Guinea, United States of America, National Interest, Liberalism.*

1. PENDAHULUAN

Dalam percaturan politik global, *grand strategy* digunakan suatu negara dalam penerapan cara-cara ekonomi, diplomatik, dan militer untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri. *Free and Open Indo Pasific* merupakan salah satu *grand strategy* yang dianut oleh Amerika Serikat (AS) dengan visi untuk meningkatkan konektivitas antara Asia dan Afrika melalui Indo Pasifik yang bebas-terbuka, dan mendorong stabilitas serta kemakmuran di seluruh kawasan. Awalnya strategi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka merupakan konsep terkait geopolitik yang dianut oleh Jepang. Kemudian, dalam jalinan kerjasama-nya dengan Jepang, AS berkomitmen untuk mendorong dan mengembangkan Indo-Pasifik pada beberapa bidang salah satunya untuk mengejar kemakmuran ekonomi seperti peningkatan konektivitas. Indo-Pasifik mulai memperoleh fokus perhatian banyak aktor di aras internasional karena dalam isu geopolitik berbasis kemaritiman, area ini merupakan sentral dari berbagai spektrum aspek, seperti: keamanan, lingkungan, dan perekononiman. Kerjasama bilateral antara Amerika Serikat dan negara kawasan pasifik selain untuk pemenuhan kepentingan nasional tetapi juga didasarkan pada

kepentingan bersama, baik dalam hal keamanan, ekonomi, atau isu-isu global lainnya. Maka dari itu, Papua Nugini (PNG) dengan sumber daya alam melimpah dan letak geografis strategis menjadi salah satu daya tarik bagi Amerika Serikat.

Sebagai bagian dari benua Oseania dan Kepulauan Pasifik, Papua Nugini (PNG) menjadi salah satu negara mitra Amerika Serikat (AS) di Kawasan Indo-Pasifik sejak 1975. PNG berada di kawasan yang strategis dan dinamis dilengkapi dengan sumber daya alam yang mencolok dan dekat dengan rute pelayaran utama, menjadi magnet tersendiri bagi Papua Nugini. Papua Nugini memiliki sumber daya energi, pertanian, dan mineral yang melimpah, namun harus dihadapi dengan tantangan naik turunnya perekonomian, lemahnya tata kelola, korupsi, terbatasnya kapasitas dan infrastruktur untuk memberikan layanan dasar, serta memburuknya sistem kesehatan. Hal ini sangat disayangkan jika dilihat dari Papua Nugini sebagai salah satu negara heterogen baik dilihat dari sisi demografi maupun sisi kebudayaan-nya. Kaya akan sumber daya alam, akan tetapi eksploitasi-nya terhambat oleh bentuk geografis yang rumit, permasalahan kepemilikan lahan, dan tingginya biaya pembangunan infrastruktur sehingga sektor-sektor pertambangan dan perminyakan tidak dikembangkan secara optimal (Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional, 2024).

Perekonomian PNG mengalami ketidakstabilan pada tahun 2019-2021, hal ini diakibatkan oleh pendapatan negara yang rendah disertai biaya hidup dan bisnis meningkat dengan inflasi umum hingga mencapai 6,3 persen pada Kuartal 3 tahun 2023 (International Trade Administration, 2024). Papua Nugini sebagai negara terbesar di Pasifik Selatan, berperan penting dalam membentuk masa depan kawasan ini dan melakukan hal tersebut melalui konsultasi erat dengan negara kepulauan besar lainnya, seperti Fiji, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu. Selain itu, negara-negara Kepulauan Pasifik berperan penting dalam upaya Amerika untuk mendorong kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka mendukung perekonomian global. *Free and Open Indo-Pacific* bertujuan agar masyarakat dan pemerintah memiliki visi yang sama dalam perdamaian, stabilitas, serta wilayah yang bebas dan terbuka. (The White House, 2022). Kerjasama ekonomi bilateral yang terjalin memberikan Amerika Serikat akses lebih ke sumber daya alam Papua Nugini, seperti minyak, gas alam, dan logam berharga. Sebaliknya, Papua Nugini juga dapat memperoleh teknologi dan modal dari Amerika Serikat untuk mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya tersebut. Menurut Nuechterlein, kepentingan ekonomi merupakan kepentingan yang krusial selain kepentingan pertahanan. Di samping itu juga dewasa ini ekonomi merupakan sumber kekuatan baru yang membuat sebuah Negara disegani di mata dunia. Kepentingan ekonomi yang didefinisikan Nuechterlein adalah kepentingan yang dilaksanakan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian negara melalui kerja sama ekonomi dengan negara lain sehingga terjalin hubungan dagang yang menghasilkan keuntungan. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dalam suatu negara (Mardiana, 2021).

Dalam penulisan, konsep yang digunakan penulis adalah kepentingan nasional dengan teori liberalisme. *Grand strategy* yang dituangkan dalam kerjasama Amerika Serikat dan Papua Nugini dinilai sebagai pemenuhan kepentingan nasional AS. Sehubungan dengan kepentingan nasional AS dalam *Biden-Harris National Security* 2022, yaitu dalam visi besar Amerika Serikat (*vision of a world*) terkait strategi *free and open, secure, and prosperous*. Kerjasama dan bantuan-bantuan yang diberikan AS tidak hanya menguntungkan bagi kestabilan ekonomi Papua Nugini tetapi juga menjadi investasi masa depan bagi Amerika Serikat dikarenakan potensi besar dan posisi strategis yang dimiliki oleh Papua Nugini, juga memperluas kemakmuran (*prosperity*) dan peluang (*opportunity*) ekonomi AS. Sementara itu, liberalisme pada tingkat negara bagian, dimana masing-masing negara dapat memilih jalannya sendiri dan memilih mitranya sendiri. Lalu pada tingkat regional, permasalahan di belahan dunia ini akan ditangani secara terbuka, peraturan akan dicapai secara transparan dan diterapkan secara adil, barang dan ide serta orang akan mengalir dengan bebas melintasi daratan, dunia digital, dan laut lepas. Tujuan mempertahankan tatanan berbasis aturan bukanlah untuk menjatuhkan negara mana pun. Sebaliknya, hal ini untuk

melindungi hak semua negara untuk memilih jalannya sendiri, bebas dari paksaan, dan bebas dari intimidasi (The White House, 2022).

Untuk itu, dalam kepentingan nasional Amerika Serikat terkait “*vision of a world ; free, open, secure and prosperous*” terdapat prinsip atas dasar *self-determination*, wilayah yang berintegritas, dan kebebasan berpolitik yang harus dihormati. Maka dari itu, negara bebas menentukan pilihan kebijakan luar negerinya sendiri, informasi dibiarkan mengalir dengan bebas, hak asasi manusia universal harus ditegakkan, dan perekonomian global harus beroperasi pada tingkat persaingan yang setara dan memberikan kesempatan bagi semua orang (The White House, 2022c). Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka timbul rumusan masalah dengan pertanyaan penelitian: “Bagaimana *Free and Open Indo-Pasific* sebagai *grand strategy* Amerika Serikat dalam meningkatkan stabilitas perekonomian di PNG?”. Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara deskriptif dan juga mengetahui dampak dari *Free and Open Indo-Pasific* sebagai *grand strategy* Amerika Serikat dalam peningkatan stabilitas perekonomian di PNG. Dengan menggunakan landasan teori Liberalisme dan konsep Kepentingan Nasional, penulis ingin menggali lebih dalam terkait strategi *Free and Open Indo-Pasific* dan implementasinya stabilitas perekonomian PNG. Tulisan ini, diharapkan dapat menambah wawasan dan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi studi hubungan internasional yang berfokus pada *Free and Open Indo-Pasific* sebagai *grand strategy* Amerika Serikat dalam meningkatkan stabilitas perekonomian di PNG.

2. METODE

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penggunaan metode penelitian kualitatif difokuskan pada penelitian yang akan mengungkapkan suatu fenomena yang bersifat alami melalui penelaahan data-data yang diperoleh dari lapangan (Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si, 2021). Kemudian jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif analisis yang akan ditelaah melalui data-data berdasarkan metode studi kepustakaan (*library research*). sehingga sumber data yang akan digunakan untuk mendukung analisis penelitian ini bersumber dari data sekunder, yakni didapatkan melalui buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, dan majalah ilmiah. Selain itu, dalam penelitian ini penulis akan menggunakan data sekunder yang bersumber dari internet, seperti artikel berita dan surat kabar daring dengan mengedepankan sumber data yang bersifat valid dalam mendukung proses analisis penelitian ini. Selain itu, penulis juga akan menggunakan jurnal-jurnal yang membahas tentang *Free and Open Indo-Pasific*.

Penulis memberikan ruang lingkup penelitian pada pada tahun 2020-2023. Tahun 2020-2023 diambil oleh penulis dengan alasan karena data yang digunakan dalam penelitian ini masih bersifat baru dan secara kuantitas belum banyak penulis yang meneliti tentang *Free and Open Indo-Pasific* sebagai *grand strategy* Amerika Serikat dalam meningkatkan stabilitas perekonomian di PNG. Objek penelitian ini akan berfokus pada implementasi strategi FOIP dan dampaknya terhadap perekonomian di Papua Nugini Kerjasama AS dan Papua Nugini dalam menunjang stabilitas perekonomian papua nugini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, di mana penulis mencari serta mengumpulkan data dari buku, dokumen publikasi pemerintah, hasil - hasil penelitian, serta artikel publikasi. Setelah proses pengumpulam data dilakukan, penulis akan mengolah data-data tersebut melalui analisis data dengan tujuan agar data-data yang telah diperoleh dapat dikaitkan dengan teori dan konsep yang digunakan oleh penulis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepentingan Nasional Amerika Serikat Secara Global

Tantangan-tantangan dalam globalisasi berpengaruh besar terhadap tata kelola dalam negeri. Amerika Serikat merasa dapat mengatasi tantangan tersebut melalui kepentingan nasional-nya yang dapat dicapai dengan mempromosikan multilateralisme untuk mengatasi masalah global. Keterlibatan AS dalam Indo-Pasifik secara mendalam dan konsisten sangat berpengaruh bagi kepentingan nasional Amerika Serikat sendiri. Prioritas Joe Biden adalah menghidupkan kembali demokrasi dan aliansi antara negara-negara lain. Namun, AS juga perlu mengatasi berbagai masalah perdagangan dan membatasi ketergantungan pada keamanan nasional sebagai kedok kebijakan politisi dan keamanan (Malawer, 2021). Strategi nasional AS dirancang untuk mencapai masa depan yang lebih baik dari dunia yang bebas, terbuka, aman, dan makmur. Negara-negara yang menjalin aliansi dengan AS turut memiliki pandangan yang sejalan dengan kepentingan AS. Tidak hanya itu, kepentingan nasional AS secara global juga meliputi aspek politik, ekonomi, militer, dan budaya yang mempengaruhi peran dan kebijakan AS di panggung internasional.

Secara signifikan salah satu dari elemen kunci kepentingan nasional AS secara global adalah kesejahteraan ekonomi baik dalam negeri atau luar negeri. Sebagai salah satu *great power* dalam tatanan internasional, stabilitas perekonomian AS dan Tiongkok dapat memberikan pengaruh terhadap kemakmuran perekonomian global secara keseluruhan. Semenjak akhir perang dunia kedua, Amerika Serikat mengambil peran penting dalam mempromosikan perdagangan bebas, investasi, dan pertumbuhan ekonomi di luar negeri, tidak lupa juga memastikan keuntungan ekonomi yang adil bagi perusahaan dan warga negara AS. Selain faktor ekonomi, terdapat juga perkembangan politik, dan keamanan yang mempengaruhi kepentingan nasional AS secara global.

Free & Open Indo Pasific (FOIP)

Pada awalnya strategi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka merupakan konsep terkait geopolitik yang dianut oleh Jepang. Kemudian dalam jalinan kerjasama-nya dengan Jepang, AS berkomitmen untuk mendorong dan mengembangkan Indo-Pasifik pada beberapa bidang salah satunya untuk mengejar kemakmuran ekonomi seperti peningkatan konektivitas dan lainnya. Dalam strategi pendekatannya, Amerika Serikat memaparkan dengan jelas terkait tujuannya dalam membangun tatanan dunia yang *free, open, prosperous, and secure*. FOIP dianggap merupakan *grand strategy* Amerika Serikat untuk menghadapi Tiongkok dan mempertahankan serta memperluas pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik. Salah satu hambatan bagi keberhasilan implementasinya adalah Tiongkok menganggap langkah kebijakan ini dan kerangka konseptualnya bertujuan untuk membendung dan membatasinya (Valencia, 2018). Visi yang dimiliki oleh *Free and Indo-Pasific* bertujuan untuk meningkatkan konektivitas melalui Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, dan mendorong stabilitas dan kemakmuran di seluruh kawasan tersebut. Pada tahun 2019, PNG sempat melewati tantangan-tantangan yang secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negaranya secara signifikan, dimana ketidakpastian ekonomi global dan domestik masih membayangi. Hal ini mempengaruhi prospek ekonomi dimana terdapat perlambatan pada aktivitas non-sumber daya yang disebabkan oleh lesunya permintaan dalam negeri. Sebagaimana terlihat dengan berkurangnya penerimaan pajak non-sumber daya dan rendahnya inflasi, sementara lapangan kerja formal membaik selama sembilan bulan pertama pada tahun 2019 (The World Bank, 2020).

Dalam kerangka *free and open indo-pasific* terdapat 3 pilar utama yang menyokong strategi ini; Menyebarkan dan menegakkan prinsip penegakkan hukum, kebebasan navigasi, perdagangan bebas; Mengejar kemakmuran ekonomi (meningkatkan konektivitas); Memastikan perdamaian dan stabilitas (Ministry of Defense, 2020). Ketiga pilar ini menjadi komitmen Amerika Serikat dalam meningkatkan stabilitas perekonomian di Papua Nugini. Kemerosotan perekonomian PNG beberapa tahun terakhir,

mendorong keterlibatan AS dalam mewujudkan visi konektivitas terkait FOIP dan membantu peningkatan kemakmuran perekonomian kawasan. Diharapkan strategi FOIP ini dapat membawa peluang yang lebih besar untuk menciptakan banyak koneksi yang terhubung baik di dalam negara, antar-negara, dan di seluruh dunia. Oleh karena itu, penting bagi Amerika Serikat (AS) untuk menjaga kemitraan-nya di kawasan Indo-Pasifik, khusus-nya Papua Nugini (PNG) guna mencapai pilar-pilar *Free and Open Indo Pasific*.

Kerjasama Ekonomi Bilateral AS-PNG Dalam Free & Open Indo Pasific (FOIP)

Menurut Patricia Veevers-Carter *World Bank Country Manager* untuk Papua Nugini, bahwa “Papua Nugini telah menghadapi banyak tantangan selama beberapa tahun terakhir, salah satunya gempa bumi pada bulan Februari 2018 yang berdampak buruk pada banyak nyawa dan perekonomian,” (The World Bank, 2019). Dimulai dari pertumbuhan PDB riil melambat dari 2,8 persen pada tahun 2017 menjadi 0,3 persen pada tahun 2018, menyusul kontraksi di sektor ekstraktif akibat gempa bumi pada bulan Februari 2018. Hal ini berbeda dengan proyeksi pertumbuhan tahun 2018 sebesar 2,5 persen yang dibuat sebelum terjadinya gempa bumi (The World Bank, 2019). Selain itu, harga komoditas global yang menurun dan kemerosotan ekonomi akibat pandemi COVID-19 memberikan dampak negatif terhadap Papua Nugini. Jatuhnya harga komoditas global mengakibatkan penurunan investasi modal/infrastruktur, penurunan pemungutan pajak penghasilan, dan kekurangan devisa. Industri inti seperti manufaktur dan ritel belum menunjukkan kinerja yang diharapkan, hal ini disebabkan oleh kekurangan devisa yang menghambat masuknya investasi asing langsung dan berdampak pada penurunan dalam perekonomian PNG (International Trade Administration, 2024).

Sejak tahun 1970-an setelah kemerdekaan Papua Nugini pada tahun 1975, hubungan ekonomi bilateral antara Amerika Serikat dan Papua Nugini mengalami perkembangan yang signifikan. Kerjasama yang terjalin antara kedua negara ini meliputi perdagangan, investasi, bantuan pembangunan, dan kerjasama dalam sektor energi dan sumber daya alam. Pada bulan April 2022, Papua Nugini ditetapkan sebagai salah satu negara fokus di bawah Strategi AS “*Strategy to Prevent Conflict and Promote Stability*” (SPCPS). Kerjasama yang dijalankan oleh Amerika Serikat baik secara bilateral, dan multilateral, menunjukkan komitmen-nya dalam isu-isu penting di negara kawasan Indo-Pasifik seperti ketahanan iklim, kesehatan, dan membantu stabilitas perekonomian negara. Demikian juga dengan tantangan bersifat internal yang dialami oleh Papua Nugini termasuk perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, kekerasan berbasis gender, masalah stabilitas internal, dan masalah politik (U.S Department of State, 2023). Amerika Serikat dan Papua Nugini mempunyai jalinan yang erat, dan Pemerintah AS berupaya meningkatkan stabilitas Papua Nugini sebagai mitra AS. Kedua negara bekerja sama dalam banyak prioritas bersama mulai dari meningkatkan transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik, hingga memerangi perdagangan manusia, serta pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

FOIP menempatkan sekutu dan mitra AS di garis terdepan. Sebenarnya Ini bukan merupakan fokus yang baru, melainkan telah disesuaikan dengan visi strategis yang lebih komperhensif kawasan ini, dengan tujuan mengatasi dan mengembangkan tantangan serta visi kebijakan AS di Indo-Pasifik yang dipaparkan dengan lebih jelas. Hal ini memberikan artikulasi yang lebih jelas, di seluruh kebijakan AS dengan mitra lainnya terkait cara memperkuat dan menyesuaikan aliansi dan kemitraan. Sesuai dengan yang tercatat dalam strategi FOIP bahwa “Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka dapat tercapai jika tercapai-nya kapasitas kolektif untuk era baru; Tindakan bersama kini menjadi kebutuhan strategis. Aliansi, organisasi, dan peraturan yang dibangun oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya harus disesuaikan; bahkan jika diperlukan, harus diperbaharui bersama. Lalu akan diwujudkan melalui kisi-kisi koalisi yang kuat dan saling memperkuat.” Amerika Serikat bermitra dengan Papua Nugini dalam memperkuat hubungan ekonomi, kerja sama keamanan, dan hubungan antar masyarakat, serta mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, termasuk melalui rencana untuk bekerja sama dengan Kongres untuk menyediakan lebih dari \$45 juta kepada Papua Nugini (U.S Department of State, 2023).

Beberapa bantuan diberikan oleh Amerika Serikat dalam bidang pembangunan seperti, pendidikan, Kesehatan, infrastruktur, dan pembangunan kapasitas institusi. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Nugini dan memperkuat kerjasama antara kedua negara. Berdasarkan *Economic Assistance Agreement* (EAA), Pemerintah Amerika Serikat menyediakan \$21 juta per tahun untuk mendukung pembangunan ekonomi di kawasan ini melalui Badan Perikanan Forum Kepulauan Pasifik. Dalam hal ini, bantuan yang datang dari AS tidak semata-mata demi kepentingan nasional AS sendiri. Melainkan, merupakan sebuah langkah AS untuk menunjukkan komitmen, dedikasi, dan investasi untuk masa depan PNG. Upaya yang diterapkan oleh AS adalah sebagai bentuk prioritas politik luar negerinya ke Kawasan Indo-Pasifik. Menurut *U.S. Census Bureau data*, pada tahun 2018 total perdagangan barang antara Amerika Serikat dan Papua Nugini adalah \$177,1 juta; Ekspor barang AS sebesar \$87 juta dan impor barang sebesar \$90,1 juta (U.S Department of State, 2020). Pada bidang perdagangan, PNG secara khusus mengeksport komoditas seperti minyak, gas alam, dan logam berharga sedangkan, Amerika Serikat mengeksport barang-barang seperti kendaraan bermotor, mesin, dan barang elektronik. Selain itu juga, dalam hubungan bilateral ini terdapat juga investasi asing langsung Papua Nugini di Amerika Serikat sebanyak \$1,0 (U.S Department of State, 2023).

Dampak Kerjasama Bilateral Ekonomi AS-PNG Dalam Dukungan Stabilitas Perekonomian di PNG

Pada tahun 2022, total ekspor Amerika Serikat ke Papua Nugini berjumlah sekitar US\$120 juta. Di samping itu, industri AS telah memainkan peran penting dalam mewujudkan potensi pertambangan dan energi di Papua Nugini. ExxonMobil memiliki keterlibatan utama dalam proyek gas alam cair/*Liquid Natural Gas* (LNG) di Papua Nugini. ExxonMobil merupakan perusahaan multinasional milik AS yang bergerak pada bidang minyak dan gas. Proyek ini didukung pada tahun 2009 oleh pembiayaan ekspor sebesar US\$3 miliar dari *U.S. Export-Import Bank (EXIM BANK)*, yang pada saat itu merupakan eksposur tunggal terbesar dalam sejarah *Export-Import*. Pada Mei 2023, total pendapatan ExxonMobil melalui proyek LNG kepada negara sejak tahun 2014 berjumlah sekitar US\$5,6 miliar. Selain itu pada tahun 2023, *Newmont Corporation* atau yang biasa disebut dengan *U.S. Gold Giant* menyepakati pembelian *Newcrest Mining Limited* senilai US\$19,2 miliar. Akuisisi Newmont akan memungkinkan perusahaan yang berbasis di Colorado untuk memperluas operasi penambangannya di Amerika Utara dan Selatan, Afrika, Australia, dan sekarang di PNG, sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi PNG (International Trade Administration, 2024).

Kehadiran Amerika di PNG memberikan dampak salah satunya dengan menonjolnya perusahaan swasta. Proyek gas alam cair yang meningkat, terciptanya proyek pertanian komersial, peningkatan fasilitas kesehatan masyarakat, dan pengembangan tenaga kerja. Pada tahun 2023, [Google](#) sebagai perusahaan multinasional milik AS memasuki wilayah Kepulauan Pasifik dengan mengumumkan akan membangun kabel internet bawah laut yang akan melayani tujuan pertahanan, ekonomi, dan pembangunan manusia yang signifikan di seluruh wilayah tersebut. PNG akan menjadi salah satu dari [12 negara Kepulauan Pasifik yang terlibat](#) dalam proyek terbaru ini (United States Institute of Peace, 2023). Amerika Serikat merupakan salah satu pengeksport utama bidang jasa ke wilayah Indo-Pasifik yang memacu pertumbuhan kawasan. Sehubungan dengan itu, Amerika Serikat mengajukan suatu kerangka kerja ekonomi Indo-Pasifik dengan kemitraan multilateral untuk tahun mendatang. Kerangka kerja ekonomi ini diharapkan juga dapat membantu perekonomian AS untuk memanfaatkan transformasi teknologi yang cepat termasuk dalam ekonomi digital, dan beradaptasi dengan transisi energi (The White House, 2022).

Dikarenakan kedekatan negara-negara Kepulauan Pasifik dengan jalur perdagangan penting dan relevansinya dengan aset keamanan AS dan sekutunya, profil strategis PNG semakin berkembang. Hubungan ekonomi bilateral yang terjalin antara AS dan PNG menghadirkan keterbukaan ekonomi yang sehubungan dengan itu, dipaparkan dalam *The Biden-Harris Administration's National Security Strategy* terkait visi Amerika Serikat dalam mengejar *free, open, and prosperous Indo-Pacific* dimana kerjasama

ekonomi yang telah terjalin ini, selaras dengan 3 pilar *Free and Open Indo-Pasific* guna mengejar kemakmuran dan stabilitas di kawasan. Dengan sumber daya alam yang melimpah, Papua Nugini menjadi produsen minyak dan gas alam yang signifikan di Kawasan Pasifik. Selanjutnya, dengan aktivitas perekonomian yang terjalin oleh kedua negara ini memberikan dampak pada peningkatan PDB riil PNG. Serta memperluas peluang investasi AS di Kawasan Pasifik. Sektor sumber daya PNG diperkirakan tumbuh sebesar 3,7 persen pada tahun 2022 konsisten dengan produksi dari pertambangan serta peningkatan kapasitas produksi dari proyek *Liquid Natural Gas PNG* (U.S. Department of States, 2023). Amerika Serikat secara berkelanjutan menanamkan modal investasi di PNG dalam sektor energi, pertambangan, perkebunan, yang membantu menggerakkan ekonomi Papua Nugini dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Pertumbuhan industri pertambangan diperkirakan sebesar 5,4%. LNG PNG terus berkelanjutan dari komersialisasi gas alam cair yang menghadirkan perusahaan-perusahaan asing yang bergerak pada bidang pertambangan seperti TotalEnergies, ExxonMobil, dan Santos dengan kolaborasi berkelanjutan di tahun yang akan datang (U.S. Department of States, 2023). Selain itu, perusahaan telekomunikasi juga mengantisipasi pertumbuhan dan melihat peluang investasi asing yang bagus di PNG dan Pasifik. Dalam hal ini, secara langsung membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua negara. Melalui investasi, perdagangan dan ekspor impor yang terjadi, memberikan efek pada pertumbuhan ekonomi dan mempererat peningkatan aktivitas ekonomi antar kedua negara dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kerjasama ekonomi bilateral juga dapat memperkuat integrasi regional di kawasan Pasifik (U.S. Department of States, 2023). Hal ini dapat membawa dampak positif dalam hal stabilitas politik dan keamanan, serta memfasilitasi pertukaran budaya dan pendidikan antara kedua negara. Melalui bantuan pembangunan dan investasi, kerjasama ekonomi dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua Nugini. Ini bisa melalui peningkatan infrastruktur, akses ke layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik.

4. KESIMPULAN

Hubungan bilateral yang terjalin antara AS-PNG mengalami perkembangan yang signifikan meliputi sektor perdagangan, investasi, pertambangan, bantuan pembangunan, kerjasama dalam bidang energi, dan sumber daya alam. Hal ini menunjukkan bahwa *Free and Open Indo-Pasific* memberikan dampak terhadap stabilitas perekonomian di PNG. Dikutip dari *The World Bank* pada tahun 2019, pertumbuhan PDB riil sempat melambat pada tahun 2017. Kemerosotan perekonomian yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor eksternal seperti bencana alam dan pandemi *COVID-19*. Kehadiran AS melalui investasi pada sektor pertambangan, perdagangan, dan ekspor impor, memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan mempererat peningkatan aktivitas ekonomi antar kedua negara serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Hubungan ekonomi bilateral yang terjalin antara AS dan PNG menghadirkan keterbukaan ekonomi terkait visi Amerika Serikat dalam mengejar *free, open, and prosperous Indo-Pasific* dimana kerjasama ekonomi yang telah terjalin ini, selaras dengan 3 pilar *Free and Open Indo-Pasific* guna mencapai kemakmuran dan stabilitas di kawasan. Di samping itu, kerjasama ekonomi bilateral ini membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua Nugini mulai dari peningkatan infrastruktur, akses ke layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik.

5. SARAN

Dalam mengeksplorasi topik ini lebih lanjut, diperlukan tinjauan mendalam terkait konsep *Free and Open Indo-Pasific*, tujuan, dan implikasinya, termasuk dampaknya terhadap Papua Nugini. Oleh karena itu, penulis berharap strategi *Free and Open Indo-Pasific* dapat dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Papua Nugini secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Center of Strategic and International Studies (CSIS). (2022, August 17). *Addressing Fragility in Papua New Guinea*. Wwww.csis.org. <https://www.csis.org/analysis/addressing-fragility-papua-new-guinea>
- [2]. CNN Indonesia. (2023, June 16). *Papua Nugini Beri Akses Pangkalan untuk Kapal dan Pasukan Militer AS*. Internasional. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230616102223-113-962671/papua-nugini-beri-akses-pangkalan-untuk-kapal-dan-pasukan-militer-as>
- [3]. Couloumbis, T. A., & Wolfe, J. H. (1978). *Introduction to international relations : power and justice*. Prentice-Hall.
- [4]. Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=JtKREAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=metode+penelitian+kualitatif&ots=vCLzvYY5V_&sig=YITde6nscbmRHEjaGo5ZcIt7C-8&redir_esc=y#v=onepage&q=metode%20penelitian%20kualitatif&f=false
- [5]. International Trade Administration. (2024, January 11). *Papua New Guinea - Market Challenges*. Wwww.trade.gov. <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/papua-new-guinea-market-challenges>
- [6]. Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional. (2024). *Papua Nugini*. Kemenkeu.go.id. <https://ldkpi.kemenkeu.go.id/page/profile-papua-nugini>
- [7]. Malawer, S. S. (2021). Biden, National Security, Law & Global Trade: Less Subterfuge & More Strategy in the New Era of Crisis. *China and WTO Review*, 7(1), 185–198. <https://doi.org/10.14330/cwr.2021.7.1.09>
- [8]. Mardiana, V. (2021). Krisis Doklam dan Kepentingan Nasional India. *Review of International Relations*, 2(2). <https://doi.org/10.24252/rir.v2i2.17966>
- [9]. Ministry of Defense. (2020, July). *Japan Ministry of Defense*. Japan Ministry of Defense. https://www.mod.go.jp/en/d_act/exc/india_pacific/india_pacific-id.html
- [10]. The White House. (2022, September 29). *FACT SHEET: Roadmap for a 21st-Century U.S.-Pacific Island Partnership*. The White House. <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/09/29/fact-sheet-roadmap-for-a-21st-century-u-s-pacific-island-partnership/>
- [11]. The White House. (2022). *INDO-PACIFIC strategy of the United States*. <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/02/U.S.-Indo-Pacific-Strategy.pdf>
- [12]. The White House. (2022c). National Security Strategy. In *whitehouse.gov* (pp. 1–48). The White House. <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Harris-Administrations-National-Security-Strategy-10.2022.pdf>
- [13]. The World Bank. (2019). *Slower Growth, Better Prospects for Papua New Guinea Economy*. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/02/05/slower-growth-better-prospects-for-papua-new-guinea-economy>
- [14]. The World Bank. (2020, February 7). *Papua New Guinea – Facing Economic Headwinds*. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/country/png/publication/papua-new-guinea---facing->

economic-headwinds

- [15]. United States Institute of Peace. (2023, December 21). *Deepening the U.S.-Papua New Guinea Relationship*. United States Institute of Peace. <https://www.usip.org/publications/2023/12/deepening-us-papua-new-guinea-relationship>
- [16]. United States Institute of Peace. "Two Years Later, What Has the Indo-Pacific Strategy Achieved?" *United States Institute of Peace*, 15 Feb. 2024, www.usip.org/publications/2024/02/two-years-later-what-has-indo-pacific-strategy-achieved. Accessed 27 Mar. 2024.
- [17]. U.S Department of State. (2020, January 21). *U.S. Relations With Papua New Guinea*. United States Department of State. <https://www.state.gov/u-s-relations-with-papua-new-guinea/>
- [18]. U.S Department of State. (2023, May 21). *Deepening U.S. Partnership with Papua New Guinea*. United States Department of State. <https://www.state.gov/deepening-u-s-partnership-with-papua-new-guinea/>
- [19]. U.S. Department of States. (2023). *2023 Investment Climate Statements: Papua New Guinea*. United States Department of State. <https://www.state.gov/reports/2023-investment-climate-statements/papua-new-guinea/>
- [20]. Valencia, M. (2018, March 30). *What Does a "Free and Open Indo-Pacific" Actually Mean?* Thediplomat.com. <https://thediplomat.com/2018/03/what-does-a-free-and-open-indo-pacific-actually-mean/>
- [21]. Waltz, K. N. (2010). *Theory of International Politics*. Waveland Press. (Original work published 1979)
- [22]. Yani, Y. M., & Lusiana, E. (2018). SOFT POWER DAN SOFT DIPLOMACY. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 14(2), 48–65. <https://doi.org/10.24042/tps.v14i2.3165>